



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINASOSPM DPP-PA
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2019**

KABUPATEN SUKAMARA

DINASOSPM DPP-PA KABUPATEN SUKAMARA

JL. CILIK RIWUT NO. 109 KELURAHAN MENDAWAI
KABUPATEN SUKAMARA



DAFTAR ISI

			Halaman
	RINGKASAN EKSEKUTIF	i,ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
BAB IV	PENUTUP	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN :			
LAMPIRAN I	RENCANA AKSI		
LAMPIRAN II	PERJANJIAN KINERJA		
LAMPIRAN III	SOP PENGUMPULAN DATA		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari prinsip Tata Laksana Pemerintahan yang Baik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga pemerintah dalam hal ini akuntabilitas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi dan sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, tentunya LAKIP ini sendiri sangat menggambarkan kinerja SOPD selama ini efektif.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara Tahun 2019 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran – sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2019 tentunya juga merupakan pelaksanaan target realisasi dari pada renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil pengukuran rata – rata terhadap pencapaian sasaran diperoleh kesimpulan bahwa dari 3 sasaran utama yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2019, semuanya berada dalam kategori capaian **Baik**.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Sesuai analisis capaian kinerja dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian uraian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara

pada Tahun 2019 sebagai perwujudan tanggung jawab atas amanah yang diterima serta menjadi sumber umpan balik dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Sukamara,

Januari 2020



**Kepala Dinsos, PMD, PP-PA
Kabupaten Sukamara**



Drs. H. AJI NUGRAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 199203 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Good Governance yang diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Sejalan dengan makna good governance dimaksud, kebijakan umum pemerintah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Untuk mencapai sasaran dimaksud, dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, yang diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi satu organisasi dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk pencapaian kinerja organisasi, perlu ditunjang dengan adanya Perangkat Daerah yang handal. Dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara yaitu Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara di dukung dengan pegawai dan dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Daya PD

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara sebanyak 51 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer, keamanan kebersihan dan tukang kebun Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut : (data Per Desember 2019)

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	31	60,78 %
2.	CPNS	-	0 %
3.	KONTRAK/HONORER	14	27,45 %
4.	PETUGAS KEAMANAN	3	5,88 %
5.	TENAGA KEBERSIHAN	2	3,92 %
6.	TUKANG KEBUN	1	1,96%
	JUMLAH	51	100 %

2. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 21 jabatan tetapi yang terisi hanya 19 jabatan saja, sedangkan jabatan fungsional tidak ada dan Staf berjumlah 10 orang

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	3,33 %
2.	Eselon III	5	16,66 %

3.	Eselon IV	13	43,33 %
4	Fungsional	-	-
5	Staf	11	36,66 %
	Jumlah	30	100 %

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari Jumlah 30 Orang Pegawai yang ada di DINSOSPMDPP-PA terdapat 10,00 % Pegawai yang berstatus Golongan II, 70,00% pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 20,00 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0	Golongan	Jumlah (orang)	L	P	%
1.	IV	6	5	1	20,00
2.	III	21	10	11	70,00
3.	II	3	2	1	10,00
4	I	0	0	0	0
	Jumlah	30	17	13	100

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DINSOSPMDPP-PA yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana lebih mendominasi yaitu sebesar 60,00 %, Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0	Pendidikan	Jumlah	L	P	%
1.	Strata-2 (S2)	1	1	-	3,33

2.	Strata-1 (S1)	18	9	9	60,00
3.	D IV	0	-	0	0,00
4.	Sarjana Muda/ D3	6	3	3	20,00
5.	D II	1	1	-	3,33
4	SLTA/SMK	4	3	1	13,33
5	SLTP	-	-	-	-
	Jumlah	30	17	13	100

5. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 30 pegawai DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara terdapat 61,29 % yang telah mengikuti penjenjangan. Untuk Diklat PIM III sebanyak 6 Orang , sedangkan jenis penjenjangan PIM IV sebanyak 13 Orang dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah	L	P
1.	Diklat PIM II	1	1	
2.	Spama/Diklat PIM III	5	4	1
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	13	6	7
	Jumlah	19	11	8

6. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	17	13	30

7. Daftar Pegawai Pada DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara Per Desember 2019 :

NO.	NAMA	ESELON	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. AJI NUGRAHA, M.M NIP. 19660205 199203 1 009	II b	PEMBINA TK.I GOL IV /b	Kepala Dinas SOSPMDDPP-PA
2	H. SUTİYONO, SP. NIP. 19630701 198603 1 019	III a	PEMBINA TK.I GOL IV /b	Sekretaris Dinas SOSPMDDPP-PA
3	H.M. ARSYAD NIP. 19630310 198407 1 001	III b	PEMBINA GOL IV/a	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
4	SUMARDI NIP. 19630830 198603 1 015	III b	PEMBINA GOL IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin
5	MUHAMAD ROMDONI,SE NIP. 19721025 200312 1 005	III b	PEMBINA GOL IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
6	DUDDIANA SARI, SE NIP. 19740323 200501 2 011	III b	PEMBINA GOL IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
7	TUTWURI HANDAYANI, SE NIP.19800326 200312 2 006	IV a	PENATA TK.I GOL III /d	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
8	YUNI ARSASI, S.IP NIP. 19800411 200604 2 023	IV a	PENATA TK.I GOL III / d	Kasi Bina Pemerintahan Desa
9	MILKE TRI HARTANTI, S.Sos NIP. 19790618 200604 2 006	IV a	PENATA TK.I GOL III / d	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
10	CANDRA HARMAWAN, S.Sos NIP. 19760308 200312 1 005	IV a	PENATA TK.I GOL III / d	Kasi Jaminan Sosial Keluarga
11	ABDULLAH NIP.19760705 199603 1 003	IV a	PENATA TK.I GOL III / d	Kasi Rehabilitasi Sosial
12	HERDALENA, S.Sos NIP.19740802 200902 2 001	IV a	PENATA TK.I GOL III / d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi Sosial
13	DENNY VIRA SARI, S.ST NIP. 19790919 200312 2 011	IV a	PENATA GOL III / c	Kasi Advokasi, Konseling dan Pembinaan
14	AGUS YULIAWANTO, SE NIP. 19790323 201001 1 008	IV a	PENATA GOL III / c	Kasi Fasilitasi Pembangunan Desa
15	ANDUNG, SE NIP. 19791109 201001 1 004	IV a	PENATA GOL III / c	Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
16	LAILY INDAH HAMIDIYAH,S.Kom NIP. 19820802 201001 2 006	IV a	PENATA GOL III / c	Kasi Pemberdayaan Perempuan
17	FATHUR RAHMAN HIDAYAT, SE NIP. 19860822 201001 1 001	IV a	PENATA GOL III / c	Kasubbag Keuangan
18	WUS'ATUL ALFIYAH, S.Sos NIP.19810622 201001 2 002	IV a	PENATA GOL III / c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19	ATO'ILLAH, A.Md NIP.19760801 200501 1 009	IV a	PENATA GOL III / c	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
20	NOVITA SARI, A.Md NIP. 19801113 200312 2 005		PENATA MUDA TK. I GOL III / b	Bendahara Pengeluaran
21	BIRTY EKALINA, A.Md NIP. 19700405 200501 2 010		PENATA MUDA TK. I GOL III / b	Pengadministrasi Kepegawaian
22	MARKUS BAYU SANTOSO, ST		PENATA MUDA TK. I	Analisis Prasarana Kota dan Pedesaan

	NIP. 19750731 201212 1 001		GOL III / b	
23	AHJAN SUARDI, SH NIP. 19661014 201212 1 001		PENATA MUDA TK. I GOL III / b	Pengelola Kesejahteraan Sosial
24	EVA LESTARI, S.IP NIP. 19781104 200501 2 015		PENATA MUDA TK. I GOL III / b	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
25	MARIA AGUSTINA, AMG NIP. 19850817 200803 2 004		PENATA MUDA TK. I GOL III / b	Analisis Perlindungan Perempuan
26	HERRY SATRIA, A.Md NIP. 19750630 200902 1 001		PENATA MUDA GOL III / a	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
27	AULIA RAHMAN, A.Md NIP. 19840711 201001 1 009		PENATA MUDA GOL III / a	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
28	RUDIYANTO NIP. 19870414 200604 1 006		PENGATUR GOL II / c	Pranata Bencana
29	HARDIANTO NIP. 19710527 201212 1 003		PENGATUR MUDA TK.I GOL II / b	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
30	YUNITA HELMINDA NIP. 19800617 201212 2 001		PENGATUR MUDA TK.I GOL II / b	Pengelola Perlindungan Sosial

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sukamara dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pelaksanaan evaluasi di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun susunan Struktural Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Suakmara, Terdiri dari :

A Kepala Dinas

B Sekretaris, Terdiri Dari :

- 1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3 Subbagian Keuangan.

C Bidang terdiri dari :

- 1 Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - c Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- 2 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - c Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.
- 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a Seksi Bina Pemerintahan Desa;
 - b Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa;

- c Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 4 Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan.
- D UPTD;
- E Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a.** perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b.** pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c.** pembinaan aparatur di lingkungan dinas;
- d.** pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
- e.** pengembangan prasarana sosial dan pemerintahan desa
- f.** pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g.** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:

- a.** pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- b.** pelaksanaan urusan perlengkapan;
pelaksanaan urusan penyusunan program dinas;
pelaksanaan administrasi keuangan dan laporan;
pelaksanaan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga
pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaia
- c. Subbagian Keuangan.

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Kepala Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan

koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan **fungsi**:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. penghimpunan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan di pada dinas;
- c. penyusunan pelaporan dinas;
- d. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan **fungsi** :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;

- g. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian Keuangan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengumpulan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan pada dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada subbagian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial membawahi
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

a. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Rehabilitasi Sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan **fungsi** :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan **fungsi** :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan Penanganan Fakir Miskin serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Kepala Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahi

- a. Seksi Bina Pemerintahan Desa;
- b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Seksi Bina Pemerintahan Desa

Seksi Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa.

Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Bina Pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa

Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa.

Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa menyelenggarakan **fungsi** :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. **Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan **fungsi**:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- c. Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan.

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan **fungsi**

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perlindungan

Perempuan dan Anak menyelenggarakan **fungsi:**

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan

c. Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan

Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan.

Kepala Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pada Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Advokasi, Konseling dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD

- UPTD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas.
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai bidang

keahlian dan kebutuhan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis Jabatan Fungsional), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur.

Sistem, Prosedur dan Mekanisme

Dalam pelaksanaan tugasnya DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan pada DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

Adapun elemen - elemen penting dalam organisasi DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

a. Spesialisasi Pekerjaan (*work specialization*):

Dalam Organisasi DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara terdapat pembagian pekerjaan dimana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah sesuai dengan spesialisasi pekerjaan, karyawan memiliki spesialisasi tugas dari seluruh kegiatan.

b. Departementalisasi (*departementalizazion*):

Adanya pengelompokan pekerjaan-pekerjaan sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasikan dengan baik.

c. Rantai Perintah (*chain of command*):

Adanya garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Kewenangan dan kesatuan perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai perintah ini karena dengan kewenangan (*authority*) adanya hak-hak yang melekat pada kedudukan pimpinan untuk memberikan perintah untuk dipatuhi dengan prinsip kesatuan perintah

(unity of commad) menunjukkan bahwa seorang karyawan memiliki satu atasan dan kepadanya ia harus bertanggung jawab secara langsung.

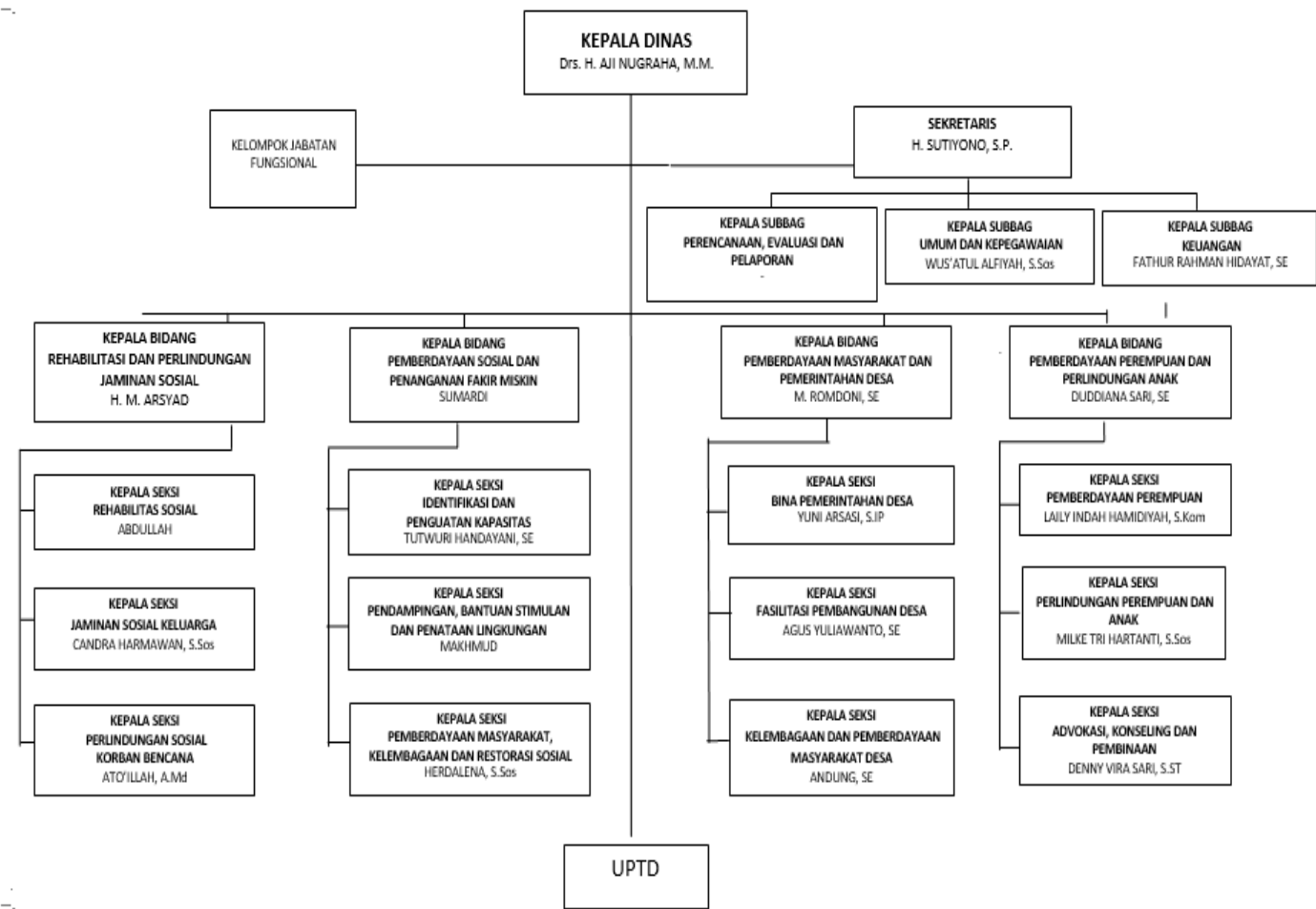
d. Rentang Kendali (span of control):

Adanya jumlah tingkatan atau jumlah manajemen yang dimiliki organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara

e. Formalisasi (formalisms)

Tugas pekerjaan dalam DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara telah terstandarisasikan, DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara memiliki tingkat formalisasi yang tinggi, mengingat Pegawai selalu menangani kegiatan atau hal yang sama dengan cara yang sama, dan menghasilkan keluaran yang sama pula, terdapat uraian pekerjaan jelas, banyak peraturan organisasi, dan prosedur yang terdefiniskan dengan jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKAMARA**



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. RKT dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti dana, sumber daya manusia, waktu dan lain – lain. Berdasarkan sumber daya yang ada pada tahun 2019 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara telah menetapkan Rencana Kinerja sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2019 selengkapnya terdapat pada lampiran .

Rencana Kinerja PD tahun 2019

1. Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1	meningkatnya kualitas Manajemen dan Tertib admistrasi desa	Persentase desa yang mengikuti kegiatan BBGRM dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
2	meningkatnya kualitas dan kemampuan Aparatur desa dalam pengelolaan manajemen , administrasi dan keuangan desa	Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi
3	desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan P3MD (camat, pemerintah desa, pld, pd, dan tenaga ahli P3MD) aktif
		Jumlah PKK Aktif
5	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG
6	Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / terfasilitasi
7	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Kube aktif
8	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tersedianya data base Terpadu
		Jumlah Peserta Rastra
		Jumlah Orang Terlantar yang memperoleh Fasilitasi
		Jumlah Fakir Miskir yang memperoleh Pelatihan Keterampilan
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah Peserta Penerima PBI JKN BPJS
		Jumlah PKH

10	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma.
11	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Tagana Aktif
12	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut
		jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG
13	Meningkatkan Nilai Kepahlawanandan kesetia kawan sosial terhadap Peteran dan Bela Cinta Tanah Air	Jumlah Peteran yang memperoleh Bantuan
		Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan

2. Program

Tahun 2019 DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara Melaksanakan Program dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Indikator
1	Program Pemberdayaan Fakir Misikin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS lainnya	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Penerima RASTRA- Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh pelatihan keteampilan- Tersedianya Data Base Terpadu- Jumlah KUBE
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah PBI JK BPJS- Jumlah PKH- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma.- Jumlah Tagana Aktif
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	<ul style="list-style-type: none">- jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG- Jumlah ODGJ yang terfasilitasi
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">- aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut- Terlaksananya peringatan Hari Pahlawan- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
6	Program pembinaan dan fasilitasi desa	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah desa yang memperolehpendampingan dalam pengelolaan APBDes
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah peserta rapat koordinasi P3MD dan Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana

		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah PKK Aktif- Terfasilitasinya Gelar Teknologi Tepat Guna
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Peserta Sosialisasi PUG meningkat pemahamannya tentang Pengarustamaan Gender- Terlaksananya pendataan dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak- Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / terfasilitasi- Jumlah P2WKSS- Jumlah Peserta sosialisasi Sistem Informasi Gender dan Anak- Jumlah peserta rapat koordinasi persiapan Kota Layak Anak- Terlaksananya Lomba Peringatan Hari Anak Nasional
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan- Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat-

Penetapan Kinerja Tahun 2019

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara dibuat berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 , dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara ini dapat kami simpulkan , bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SOPD menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara periode sebelumnya 2013-2018, agar dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara (lampiran terlampir)

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara PAN menindaklanjuti

dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara dibuat berdasarkan Rencana Kerja Tahun berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan SOPD , dalam tabel Perjanjian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara ini dapat kami simpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara, ada pun Realisasi yang dicapai sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Prog/Keg	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	- 7	-8
1	Terciptanya Anggaran yang responsif Gender pada Semua Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi PUG	Orang	160	Prog : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Keg : Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	72.686.000	160 Orang
2	Meningkatkan Peran serta Wanita dalam Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Terbaik Kegiatan PW2KSS dan GSI	Kecamatan	5	Keg : Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	31.149.500	5 kec
3	Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya pendataan dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak	Kasus /kecamatan	0 / 5 kecamatan	Keg : Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	20.400.000	5 kec
		Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	kasus	0	Keg : penanganan kasus		4 kasus
4	Tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak	Terlaksananya Sosialisasi SIGA	Orang	120	Keg : Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	42.473.000	120 Orang
5	Terbentuknya Kota Layak Anak	Terselenggaranya Rapat Koordinasi persiapan Kota Layak Anak	orang	50	Keg : Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)	24.775.000	50 Orang
6	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	Terlaksananya lomba peringatan Hari Anak Nasional	Kegiatan	1	Keg : Peringatan Hari Anak Nasional	34.900.000	1 Kegiatan
7	Terlaksananya Evaluasi perkembangan Desa	Lomba Desa Dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	7	Prog : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Keg : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	62.960.000	7 Desa/Kelurahan
8	Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di perdesaan dalam membangun desa melalui budaya gotong royong	Terlaksananya Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan	1	Keg : Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	69.371.498	1 kegiatan

9	Meningkatkan kapasitas apartur dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa	Terlaksanan ya bimtek administrasi pengelolaan keuangan desa	Orang	116	Prog : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Keg : Bimtek Aparatur Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa	98.150.000	116 Orang
10	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksanya kegiatan pengelolaan APBDes	Desa	29	Prog : Pembinaan dan fasilitasi desa Keg : Fasilitasi APBDes	61.000.000	29 Desa
11	terlaksananya Rakor kegiatan P3MD	terlaksananya rapat koordinasi P3MD	kegiatan	12	Prog : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan Keg : Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000	12 keg
12	Terwujudnya PKK Aktif	Terlaksanan ya Kegiatan PKK	PKK Kabupaten,/ PKK Kecamatan,/ PKK Kelurahan	8	Keg : Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	950.000.000	8 PKK Kabupaten,/ PKK Kecamatan,/ PK K Kelurahan
13	Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk produk daerah agar mampu bersaing di pasar	Terfasilitasin ya Gelar Teknologi Tepat Guna	Kegiatan	1	Keg : Gelar Teknologi Tepat Guna	63.925.000	1 Kegiatan
14	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terlaksanan ya sosialisasi dan penyerahan bantuan KUBE FM	Kegiatan	1	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	16.100.000	1 keg
		kesiap siagaan terhadap penanggula ngan bencana dan tanggap cepat darurat	Bulan	12	Penanganan Masalah Masalah Strategis Yang menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian Luarbiasa	78.333.333	12 bln
		tewujudnya pelaksanaan pelayanan BPJS untuk masyarakat miskin	Bulan / org	12 / 8000 jiwa	Pelayanan BPJS Untuk Masyarakat Miskin	36.206.500	30.287 jiwa
		jumlah masyarakat miskin yang telah melaksanak an program keluarga harapan	KPM	1.390	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	65.000.000	1.034 KPM

		jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang tertangani	orang	6	Pendayagunaan Para penyadang cacat dan eks trauma	51.780.000	6 org
		terwujudnya pelaksanaan kegiatan hari lansia	Kegiatan	1	Pengembangan Model kelembagaan perlindungan sosial	23.200.000	1 keg
15	Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial terhadap Veteran dan Bela Cinta Tanah Air	terwujudnya peringatan hari pahlawan	Kegiatan	1	pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	181.116.136	1 keg

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah menjadi target dalam perjanjian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Target rencana kerja yang telah di tetapkan , akan tetapi dari target yang telah di tetapkan ada salah satu kegiatan yang tidak sesuai dengan yang di harapkan yaitu tingkat kekerasan pada anak yang cukup tinggi dapat di lihat pada jumlah kasus sebanyak 4 kasus yang terjadi pada tahun 2019 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang akan dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Masing - masing indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan kedalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori
I	Sama dengan atau lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	80 % s.d 99 %	Baik
III	Kurang dari atau sama dengan 80 %	Cukup

Apabila dalam satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata – rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut diilustrasikan dalam *form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran IV*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, implementasi Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara dalam Tahun 2019 mencakup pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategik. Dari penilaian sendiri (self assessment) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara tahun 2019 rata – rata sebesar 90,00 % atau dalam kategori Baik.

Rincian capaian kinerja untuk masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	160 Orang	160 Orang	100%
2	Menurunnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	<2 orang	4 Orang	
3	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%
4	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi, sumbangan pendapatan perempuan	59,78%	5%	8,36%
5	meningkatnya implementasi kota layak anak	50 Orang	50 orang	100%

6	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus	150 Orang	150 Orang	100%
6	Meningkatnya peran serta OPD dan penyedia data gender dan anak	120 Orang	120 Orang	100%
7	Indeks Pembangunan Gender	91,29	90.84	
3	meningkatnya kualitas dan kemampuan Aparatur desa dalam pengelolaan manajemen , administrasi dan keuangan desa	20%	20 %	100%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	20%	20%	100%
6	Meningkatnya pelayanan Penanganan terhadap PMKS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	30 Orang	0 Orang	-
8	Meningkatkan pemberdayaan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	40 Orang	150 Orang	375%
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	32.369 Jiwa	31.321 Jiwa	96,76%
10	Meningkatnya pemenuhan	100%	100%	100%

	kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana			
11	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	100%	100%
12	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	60 Orang	6 Orang	1%

Analisis Capaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2019. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

- Sasaran :**
- Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat
 - Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.

- Meningkatkan Nilai Kepahlawanandan kesetia kawan sosial terhadap Peteran dan Bela Cinta Tanah Air

Secara keseluruhan nilai capaian sasaran **Baik**. Uraian selengkapnya per indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya atau tercapainya sasaran yang di harapkan , dan program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya sasaran diatas adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- Jumlah Penerima Rastra	- 1.394	- 1.394
		- Jumlah KUBE	- 20	- 20
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma	- 100%	- 100%
		- Jumlah Tagana Aktif	- 52	- 50
		- Jumlah Pemulangan Orang Terlantar	- 8	- 11
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	- Jumlah Peserta PBI JK BPJS	- 7.811	- 30.287
		- Jumlah PKH	- 932 KPM	- 872 KPM
4	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	- jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG	- 2	- 3
		- Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut	- 56	- 52
5	Meningkatkan Nilai Kepahlawanandan kesetia kawan sosial terhadap Peteran dan Bela Cinta Tanah Air	- Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan	- 800	- 1 Keg

Dapat dilihat dari hasil indikator capaian pada bidang sosial dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah di rencanakan .

Sasaran : Meningkatkan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tertingkatnya Pemberdayaan perempuan perempuan dan kesejahteraan keluarga

Secara keseluruhan nilai capaian sasaran **Baik**. Uraian selengkapnya per indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya atau tercapainya sasaran yang di harapkan , dan program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya sasaran diatas adalah :

[[

• **Indikator Sasaran :**

1. **Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani**
2. **Jumlah kasus KDRT dan kekerasan terhadap Perempuan dan anak**
3. **Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga**
4. **Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu**
5. **Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional**
6. **Terlaksananya Rapat Koordinasi Kota Layak Anak**
7. **Meningkatnya Pemahaman para Peserta Sosialisasi PUG tentang Pengarusutamaan Gender**
8. **Meningkatnya Pemahaman para Peserta sosialisasi Sistem Informasi Gender dan Anak**

untuk rasio KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya banyak terjadi kasus di masyarakat dan kian tahun kian meningkat , akan tetapi masyarakat tidak melaporkan hal tersebut (KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak) kepada lembaga terkait dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendampingan dari instansi dan lembaga terkait dalam kasus kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak , dalam hal ini diharapkan agar dapat diadakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat oleh lembaga terkait kepada masyarakat tentang proses penanganan masalah KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar koordinasi antar instansi terkait dapat terus di tingkatkan .

Untuk Jumlah kelompok binaan Lembaga belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi masih banyak terdapat hambatan antara lain kurangnya kesadaran dari beberapa anggota kelompok lembaga terhadap kewajiban sebagai anggota kelompok, sehingga menghambat pembentukan kelompok usaha baru .

Untuk rasio rata – rata jumlah kelompok binaan DINSOSPMDPP- PA Kabupaten Sukamara akan terus membimbing kelompok – kelompok binaan terutama kaum perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri .

Kegiatan Sosialisasi PUG baru di laksanakan di Kabupaten Sukamara. perencanaan dan penganggaran responsife gender. Dan diharapkan untuk selanjutnya di Kabupaten Sukamara untuk semua proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG).

Sistem Informasi Gender dan Anak merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menyediakan data dan informasi tentang data terpilah gender dan anak di Kabupaten Sukamara. Diharapkan Kabupaten Sukamara bisa mempunyai data terpilah gender dan anak yang kemudian akan menjadi Profil Gender dan Anak Kabupaten Sukamara.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sukamara berkisar di angka 90,84 Dari targetnya sebesar 91,29. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki- laki dan perempuan semakin kecil.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen sebanyak 5 orang dari jumlah anggota parlemen yang berjumlah 20 orang.

Pada Tahun 2019 terdapat 4 kasus kekerasan yang di tangani P2TP2A Kabupaten Sukamara. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kasus	Jumlah Kasus
1	Persetubuhan Anak Dibawah Umur	2
2	Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
	Jumlah	4

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Jumlah KDRT dan kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	0	5	3	4
Indeks Pembangunan Gender	-	91,24	91,45	90,84
Rata – rata jumlah kelompok binaan	5	5	5	5

lembaga				
Terlaksananya P2TP2A	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec
Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec
Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, kepemimpinan dan teknisi, sumbangan pendapatan perempuan	25%	25%	25%	25%

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran diatas antara lain :

- a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
- b. Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- d. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
- e. Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)
- f. Peringatan Hari Anak Nasional

- Sasaran :**
- 1. Tertingkatnya Pelayanan Aparatur yang prima**
 - 2. Tertingkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 3. Terpenuhinya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja**

Secara keseluruhan nilai capaian sasaran **100%** atau kategori capaian **Baik**.
Uraian selengkapnya per indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya atau tercapainya sasaran yang di harapkan , dan program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya sasaran diatas adalah :

• Indikator Sasaran :

- 1. Tertib administrasi dan pelayanan prima**
- 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur**
- 4. Tertingkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur**

5. Terpenuhinya akuntabilitas peraturan kinerja SKPD

indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan prima secara eksternal dan internal dan dalam upaya menuju kepada pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran diatas antara lain :

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran : Meningkatkan kapasitas apartur dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa terlaksananya Rakoord kegiatan P3MD

Secara keseluruhan nilai capaian sasaran **95,00 %** atau kategori capaian **Baik**. Uraian selengkapnya per indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya atau tercapainya sasaran yang di harapkan , dan program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya sasaran diatas adalah :

• **Indikator Sasaran :**

- Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi
- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban
- Terlaksananya rapat koordinasi P3MD
- Persentase desa yang mengikuti kegiatan BBGRM dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
- Jumlah PKK Aktif

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Persentase aparatur desa yang menyelesaikan dokumen pelaporan Tepat waktu , serta di harapkan kepada seluruh desa dapat memiliki aparatur desa yang kompeten dan juga untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang manajemen dan keuangan Desa serta tertib administrasi untuk kantor Desa .

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran diatas antara lain :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Pembinaan dan Fasilitas Desa
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan dijelaskan hanya mengenai penggunaan anggaran tambahan Tahun 2018 yang terdapat pada DPA-SOPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI
		NILAI	SUMBER DANA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.529.061.460,90		1.485.470.132,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.140.000,00	DAU	59.974.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.600.000,00	DAU	10.753.350,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	146.400.000,00	DAU	140.410.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000,00	DAU	7.495.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	26.820.000,00	DAU	26.817.500,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.200.000,00	DAU	23.179.800,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.155.000,00	DAU	2.154.352,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.840.000,00	DAU	13.860.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	3.650.000,00	DAU	2.163.900,00
	Penyediaan makanan dan minuman	53.550.000,00	DAU	50.120.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	591.801.860,75	DAU	577.008.330,00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	408.831.150,00	DAU	405.960.450,00
	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	165.573.450,15	DAU	165.573.450,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	576.275.000,00		533.586.200,00
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	336.575.000,00	DAU	329.575.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	44.240.000,00	DAU	44.185.600,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163.760.000,00	DAU	132.451.100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.700.000,00	DAU	8.040.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	DAU	19.334.500,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	44.300.000,00		43.600.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44.300.000,00	DAU	43.600.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00		15.000.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,00	DAU	15.000.000,00
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	66.127.863,65		61.221.200,00

	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	16.100.000,00	DAU	16.000.000,00
	Pemutakhiran, Verifikasi dan Pengelolaan Dana Penerima Bantuan Sosial (BIPS/KIS, KKS, Rastra dan Dana Bantuan Sosial Lainnya	50.027.863,65	DAU	45.221.200,00
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	154.161.333,00		123.792.333,00
	Pelayanan BIPS Untuk Masyarakat Miskin	36.206.500,00	DAU	34.782.300,00
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	78.333.333,00	DAU	58.443.533,00
	Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)	39.621.500,00	DAU	30.566.500,00
7	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	51.780.000,00		26.023.500,00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	51.780.000,00	DAU	26.023.500,00
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	204.316.136,35		166.973.000,00
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	23.200.000,00	DAU	1.485.000,00
	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	181.116.136,35	DAU	165.488.000,00
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	297.089.000,00		278.479.480,00
	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	72.686.000,00	DAU	72.538.000,00
	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	73.140.000,00	DAU	72.232.300,00
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	49.115.000,00	DAU	46.824.300,00
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	42.473.000,00	DAU	30.037.080,00
	Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)	24.775.000,00	DAU	24.422.800,00
	Peringatan Hari Anak Nasional	34.900.000,00	DAU	32.425.000,00
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.053.925.000,00		1.001.472.025,00
	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000,00	DAU	33.472.800,00
	Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	950.000.000,00	DAU	904.074.225,00
	Gelar Teknologi Tepat Guna	63.925.000,00	DAU	63.925.000,00
11	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	132.321.498,00		130.990.498,00
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	62.950.000,00	DAU	61.619.000,00
	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	69.371.498,00	DAU	69.371.498,00
12	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	98.150.000,00		96.700.000,00
	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa	98.150.000,00	DAU	96.700.000,00
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Desa	61.000.000,00		49.000.000,00
	Pendampingan Penyusunan APBDes	61.000.000,00	DAU	49.000.000,00
JUMLAH		4.293.507.291,90		4.012.308.368,00

Alokasi dan realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara Tahun 2019 berdasarkan DPA- Perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung**

Pagu Anggaran Rp. 2.988.890.513,00 Realisasi Rp 2.851.629.659,00
Prosentase = 95,40 %

- **Belanja Langsung**

Pagu Anggaran Rp. 4.293.507.291,90 Realisasi Rp. 4.012.308.368,00
Prosentase = 93,45 %

- **Total Anggaran** Rp. 7.282.397.804,90 Realisasi Rp. 6.863.938.027,00
Prosentase = 94,25 %

C. Permasalahan dan Solusi

DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DINSOSPMDPP-PA Kabupaten Sukamara

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

No	Bidang Urusan	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Bidang Sosial	- Dukungan Pemerintah terhadap penanganan masalah sosial	- Keterbatasan pada anggaran;	- Terbitnya UU no 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial	- Banyaknya oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari masalah sosial
		- Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak	- Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM terlatih	- Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan penanganan PMKS melalui pendekatan partisipatif;	- Pergeseran Nilai Sosial Masyarakat
		- peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat	- Kurangnya tenaga fungsional	- Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;	- Penyaluran BANSOS yang tidak tepat sasaran
		- adanya Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, Korban Narkotika, HIV-Aids, Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.	- kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas untuk mendapatkany pelayanan rehabilitasi	- Dukungan infra struktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.	- Di Bidang sosial tantangan yang dihadapi adalah dengan adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini ,sehingga membuat lesu pelaku usaha maka banyak sekali kasus PHK .Dengan begitu dampaknya tentu saja meningkatnya jumlah masyarakat miskin, orang terlantardan ODDJ ,karena yang tadinya punya pekerjaan dan penghasilan tetap menjadi tidak punya penghasilan. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks pada bidang sosial .
		- Adanya kewenangan di bidang Sosial;	- kurang koordinasi dengan pihak terkait terutama masalah data ,		
		- Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin bertambah, seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan korban bencana.		

			Adanya sistem administrasi dan SOP yang jelas baik prog . Provinsi maupun kementerian	Masih terbatasnya penanganan PMKS			
			Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;	Tidak adanya tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial profesional			
				Sebaran penduduk yang tidak merata dan demografi binaan wilayah yang jauh			
				keterlambatan pendistribusi BANSOS			

2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak;	- Keterbatasan pada anggaran;	-	Terbitnya UU no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak	- Rentannya remaja terhadap NAPZA dan seks bebas
				- Belum tersedianya sistem informasi data;			
		-	Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;	- kurang koordinasi dengan pihak terkait terutama masalah data	-	Terbitnya UU no 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	- Tingginya tingkat pernikahan usia dini
		-	Adanya P2TP2A sebagai tempat / wadah konsultasi bagi perempuan dan anak	- Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM terlatih di Tk. Kecamatan	-	Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender	- masih ada oknum yang memanfaatkan kerentanan terhadap perempuan dan anak
		-	adanya SIGA dan PPRG	- masy. Masih menganggap tabu / aib untuk melaporkan tindak KDRT dan Kekerasan terhadap anak	-	Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus perempuan dan anak	
		-	adanya forum anak yang di bina oleh DINSOSPMDPP-PA	- Pengarusutamaan Gender dalam PPRG pembangunan belum di pahami dnegan baik			
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;	- Keterbatasan pada anggaran;	-	Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;	- Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
				- Belum tersedianya sistem informasi data;			- Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
				- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kerja			
		-	Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;	- Kurangnya tenaga	-	Potensi masyarakat yang	- Besarnya jumlah keluarga miskin;

					fungsional	cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;	
					- Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya aparatur pemerintahan desa yang terbatas	-	Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
					- letak demografis desa	-	Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
						-	Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

BAB IV

PENUTUP

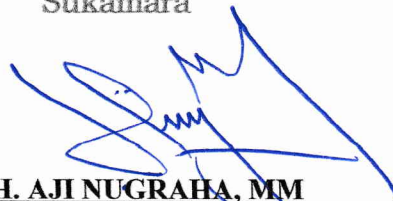
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara Tahun 2019 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 -2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2018 -2023. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun isi LAKIP ini Menjelaskan tentang Laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara selama Tahun 2019.

Kiranya LAKIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara , Disamping itu LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Sukamara, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukamara



Drs. H. AJI NUGRAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA Kabupaten Sukamara**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. WINDU SUBAGIO**

Jabatan : **BUPATI SUKAMARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SUKAMARA

H. WINDU SUBAGIO

Pihak Pertama,
**Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatkan kualitas Manajemen dan Tertib administrasi desa	Persentase desa yang mengikuti kegiatan BBGRM dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	14 %
2	meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparatur desa dalam pengelolaan manajemen , administrasi dan keuangan desa	Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	20 %
3	desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	39 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan P3MD (camat, pemerintah desa, pld, pd, dan tenaga ahli P3MD) aktif	58 orang
		Jumlah PKK Aktif	38 PKK
5	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	120 orang
6	Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / terfasilitasi	<2 kasus
7	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Kube aktif	20 Kelompok
8	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tersedianya data base Terpadu	1 Dokumen
		Jumlah Peserta Rastra	1.394 KPM
		Jumlah Orang Terlantar yang memperoleh Fasilitas	15 orang
		Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	4 Orang
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah Peserta Penerima PBI JKN BPJS	31.646 Jiwa
		Jumlah PKH	1.034 KPM
10	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma.	100 %
11	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Tagana Aktif	50 orang
12	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut	56 Orang
		jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSBD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG	4 Orang
13	Meningkatkan Nilai Kepahlawanan dan kesetia	Jumlah Penerima yang memperoleh Bantuan	7 orang

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	470.800.000	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	77.000.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Fasilitas Desa	46.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.039.425.000	APBD
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	227.476.000	APBD
6	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS	61.525.000	APBD
7	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	227.561.333	APBD
8	Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	51.780.000	APBD
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	115.019.000	APBD

BUPATI SUKAMARA

H. WINDU SUBAGIO

Sukamara, Januari 2019
 Plt. Kepala DINSOS PMDPP-PA
 Kabupaten Sukamara



HARAPAN WAHAL S.Sos. MH
 Pembina Tk. I
 Nip. 19681013 199012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISYMA LUTVY, SE**

Jabatan : **Kasubbag Perencanaan , Monitoring, dan Evaluasi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
**Kasubbag Perencanaan , Monitoring, dan Evaluasi
DINSOSPMDPP-PA
Kabupaten Sukamara**

RISYMA LUTVY, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Mengakomodir surat masuk dan surat keluar pada Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	35 surat
		Menyusun rencana kerja tahun 2019-2020	1 dokumen
		Menyusun Renstra, Renja, LPPD, Laporan Akuntabilitas Pemerintah tahun 2018	4 dokumen
		Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan pada DINSOSPM DPP-PA	3 kegiatan
		Menyiapkan dan menyusun laporan RUP dan Emonev	3 dokumen
		Menilai Sasaran kerja Pegawai	1 dokumen
		Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan	3 laporan
		Menyiapkan dan menyusun laporan TEPR	12 dokumen
		Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSPM DPP-PA	1dokumen

Plt. Kepala DINSOSPM DPP-PA

Kabupaten Sukamara

HARAPAN WAHAL S.Sos, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19681013 199012 1 001

Sukamara, Januari 2019

Kasubbag Perencanaan, Monitoring, dan
Evaluasi DINSOSPM DPP-PA

Kabupaten Sukamara

RISYMA LUTVY, SE

Penata

Nip. 19840612 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATHUR RAHMAN HIDAYAT, SE**

Jabatan : **Kasubbag Keuangan DINSOSPM DPP-PA Kab. Sukamara**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPM DPPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
Plt. Kepala DINSOSPM DPPPA
Kabupaten Sukamara

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan DINSOSPM DPPPA
Kabupaten Sukamara

FATHUR RAHMAN HIDAYAT, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Menyusun rencana kerja administrasi keuangan	1 Dokumen
		Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Penta Usaha Keuangan	1 Dokumen
		Meneliti Kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, SPP-UP, SPP GU dan SPP BTL	230 berkas
		Memperivikasi SPP dan SPJ UP, SPJ GU dan SPJ TU	1.700 berkas
		Menyiapkan SPM	230 berkas
		Menyusun laporan realisasi semester dan Laporan Keuangan	1 Laporan
		Melakukan Rekonsiliasi SP2D	12 Dokumen
		Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan	12 Dokumen
		Memberikan arahan tugas bawahan dan memonitor pelaksanaan tugas oleh bawahan	12 Kegiatan
		Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambil keputusan	12 laporan

Plt. Kepala DINSOSPM DPP-PA
Kabupaten Sukamara

HARAPAN WAHAL, S.Sos, MH

Pembina Tk. I
Nip. 19681013 199012 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kasubbag KDINSOSPM DPP-PA
Kabupaten Sukamara

FATHUR RAHMAN HIDAYAT, SE

Penata
Nip. 19860822 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARDI**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin**

SUMARDI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Kube aktif	20 Kelompok
2	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tersedianya data base Terpadu	1 Dokumen
		Jumlah Peserta Rastra	1.394 KPM
3	Meningkatkan Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial terhadap Peteran dan Bela Cinta Tanah Air	Jumlah Peteran yang memperoleh Bantuan	7 orang
		Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan	1 keg

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan pelatihan bagi penyandang kesejahteraan sosial	16.100.000	APBD
	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan pengelolaan dana penerima bantuan sosial (BPJS, /KIS, KKS, Rastra dan bantuan sosial lainnya)	45.425.000	APBD
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	91.819.000	APBD

Plt. Kepala DINSOSPMDPP-PA
Kabupaten Sukamara

Sukamara, Januari 2019
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TUTWURI HANDAYANI, SE**

Jabatan : **Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUMARDI**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin**


SUMARDI

Pihak Pertama,
Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas


TUTWURI HANDAYANI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tersedianya data base Terpadu	1 Dokumen
		Jumlah Peserta Rastra	1.394 KPM

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS - Kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan pengelolaan dana penerima bantuan social (BPJS,/KIS, KKS, Rastra dan bantuan social lainnya)	45.425.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

SUMARDI

Pembina IV. a

Nip. 19630830 198603 1 015

Sukamara, Januari 2019

Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

TUTWURI HANDAYANI, SE

Pembina Tk. I. III.d

Nip. 19800326 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAKHMUD**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUMARDI**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin**


SUMARDI

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin**


MAKHMUD



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Kube aktif	20 Kelompok

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS - Kegiatan pelatihan bagi penyandang kesejahteraan social	16.100.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

SUMARDI

Pembina IV. a

Nip. 19630830 198603 1 015

Sukamara, Januari 2019
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

MAKHMUD

Penata III.c

Nip. 19611010 198703 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERDALENA, S.Sos**

Jabatan : **Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUMARDI**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin**


SUMARDI

Pihak Pertama,
**Kasi Pemberdayaan Masyarakat,
Kelembagaan dan Restorasi Sosial**


HERDALENA, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Nilai Kepahlawanan dan kesetiaan kawan sosial terhadap Petaeron dan Bela Cinta Tanah Air	Jumlah Petaeron yang memperoleh Bantuan	7 orang
		Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan	1 keg

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Kegiatan Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	91.819.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

SUMARDI

Pembina IV. a

Nip. 19630830 198603 1 015

Sukamara, Januari 2019
Kasi Pemberdayaan Masyarakat,
Kelembagaan dan Restorasi Sosial

HERDALENA, S.Sos

Penata III. c

Nip. 19740802 200902 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.M. ARSYAD**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDDPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**PLT. Kepala DINSOSPMDDPP-PA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial
DINSOSPMDDPPA
Kabupaten Sukamara**

H.M. ARSYAD



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

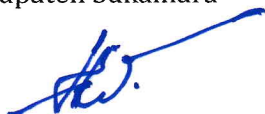
PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Orang Terlantar yang memperoleh Fasilitas	15 orang
		Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	4 Orang
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah Peserta Penerima PBI JKN BPJS	31.646 Jiwa
		Jumlah PKH	1.034 KPM
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma.	100 %
4	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Tagana Aktif	50 orang
5	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut	56 Orang
		jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG	4 Orang

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	- Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye social bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	73.900.000,-	APBD
	- Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	77.833.333,-	APBD
	- Kegiatan Pelayanan Program Keluarga Harapan	39.621.500,-	APBD
	- Kegiatan Pelayanan BPJS untuk masyarakat miskin	36.206.500,-	APBD

3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 	23.200.000,-	APBD
---	--	--------------	------

Plt. Kepala DINSOSPMDDPP-PA
Kabupaten Sukamara



HARAPAN WAHAI, S.Sos. MH
Pembina Tk. I
Nip. 19681013 199012 1 001

Sukamara, Januari 2019
Plt. Kepala DINSOSPMDDPP-PA
Kabupaten Sukamara



H. M. ARSYAD
Pembina IV.a
NIP. 19630310 198407 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHANDRA HERMAWAN, S.Sos**

Jabatan : **Kasi Jaminan Sosial Keluarga**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.M. ARSYAD**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

H.M. ARSYAD

Pihak Pertama,
**Kasi Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten
Sukamara**

CHANDRA HERMAWAN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah Peserta Penerima PBI JKN BPJS	31.646 Jiwa
		Jumlah PKH	1.034 KPM

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	- Kegiatan Pelayanan Program Keluarga Harapan	39.621.500,-	APBD
	- Kegiatan Pelayanan BPJS untuk masyarakat miskin	36.206.500,-	APBD

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

H. M. ARSYAD
Pembina IV. a
NIP. 19630310 198407 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten
Sukamara

CHANDRA HERMAWAN, S.Sos
Penata TK. I.III.d
NIP. 19760308 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : prnd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA **Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan** **Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara** **TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDULLAH**

Jabatan : **Kasi Rehabilitasi Sosial**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.M. ARSYAD**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

H.M. ARSYAD

Pihak Pertama,
Kasi Rehabilitasi Sosial DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

ABDULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah Orang Terlantar yang memperoleh Fasilitasi	15 orang
		Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	4 Orang
2	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.	Jumlah LANSIA yang Memperoleh Bantuan dan Layanan kebutuhan dasar / Aslut	56 Orang
		jumlah penyandang Disabilitas Diklat di BBRSD dan Di PSBN/FH-PSBN-WG	4 Orang

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye social bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	73.900.000,-	APBD
2	Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstrauma	51.780.000,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none">Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	23.200.000,-	APBD

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

H. M. ARSYAD
Pembina IV. a
NIP. 19630310 198407 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kasi Rehabilitasi Sosial DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

ABDULLAH
Penata TK.I.III.d
NIP. 19760705 199603 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT RJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ATO'ILLAH, S.Sos**

Jabatan : **Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.M. ARSYAD**

Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

H.M. ARSYAD

Pihak Pertama,
**Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

ATO'ILLAH, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh pemulihan trauma.	100 %
2	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Tagana Aktif	50 orang

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	77.833.333,-	APBD

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

H. M. ARSYAD
Pembina IV.a
NIP. 19630310 198407 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara

ATO'ILLAH, S.Sos
Penata III.c
NIP. 19760801 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DUDDIANA SARI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang PP-PA DINSOSPDPP-PA
Kabupaten Sukamara**

DUDDIANA SARI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	120 orang
2	Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / terfasilitasi	<2 kasus
3	Meningkatnya Pemahaman Peserta Sosialisasi P2WKSS dan GSI	Jumlah Peserta Sosialisasi P2WKSS dan GSI	5 Kecamatan
4	Meningkatnya system dan data terpilah gender	Organisasi Perangkat Daerah di kab. Sukamara	29 Perangkat Daerah
5	Terciptanya komitmen antara para pemangku kebijakan untuk mewujudkan Sukamara Kota Layak Anak	Organisasi Perangkat Pemerintah dan swasta yang terkait	51 Organisasi pemerintah/ swasta
6	Terpenuhinya Hak- Hak Anak	lomba peringatan hari anak nasional	4 Kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan- Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak- Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)- Peringatan Hari Anak Nasional	<div>85.686.000</div> <div>25.140.000</div> <div>11.615.000</div> <div>45.285.000</div> <div>26.650.000</div> <div>33.100.000</div>	<div>APBD</div> <div>APBD</div> <div>APBD</div> <div>APBD</div> <div>APBD</div> <div>APBD</div>

Plt. Kepala DINSOSPMDPP-PA
Kabupaten Sukamara

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH
Pembina Tk. I
Nip. 19681013 199012 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

DUDDIANA SARI, SE
Penata TK. I.III.d
Nip. 19740323 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LAILY INDAH HAMIDIYAH, S.Kom**

Jabatan : **Kasi Pemberdayaan Perempuan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DUDDIANA SARI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang PP-PA
DINSOSPDPP-PA
Kabupaten Sukamara**

DUDDIANA SARI, SE

Pihak Pertama,
**Kasi Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Sukamara**

LAILY INDAH HAMIDIYAH, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	120 orang
2	Meningkatnya Pemahaman Peserta Sosialisasi P2WKSS dan GSI	Jumlah Peserta Sosialisasi P2WKSS dan GSI	5 Kecamatan
3	Meningkatnya system dan data terpilah gender	Organisasi Perangkat Daerah di kab. Sukamara	29 Perangkat Daerah

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	 85.686.000 11.615.000 45.285.000	 APBD APBD APBD

Kepala Bidang PP-PA
Kabupaten Sukamara

DUDDIANA SARI SE

Penata TK. I/III/d
Nip. 19740323 200501 2 011

Sukamara, Januari 2019
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Sukamara

LAILY INDAH HAMIDIYAH, S.KOM

Penata TK. I/ III
Nip. 19820802 2010 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MILKE TRIHARTANTI, S.Sos**

Jabatan : **Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DUDDIANA SARI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang PP-PA
DINSOSPDPP-PA
Kabupaten Sukamara**


DUDDIANA SARI, SE

Pihak Pertama,
**Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Sukamara**


MILKE TRI HARTANTI, S.SOS



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / terfasilitasi	<2 kasus
2	Terciptanya komitmen antara para pemangku kebijakan untuk mewujudkan Sukamara Kota Layak Anak	Organisasi Perangkat Pemerintah dan swasta yang terkait	51 Organisasi pemerintah/swasta
3	Terpenuhinya Hak- Hak Anak	lomba peringatan hari anak nasional	4 Kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)- Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)- Peringatan Hari Anak Nasional	<div>25.140.000</div> <div>26.650.000</div> <div>33.100.000</div>	<div>APBD</div> <div>APBD</div> <div>APBD</div>

Kepala Bidang PP-PA
Kabupaten Sukamara

DUDDIANA SARI SE

Penata TK. I/III/d

Nip. 19740323 200501 2 011

Sukamara, Januari 2019
Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Sukamara

MILKE TRIHARTANTI S.SOS

Penata TK I/III/d

Nip. 19790618 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. ROMDONI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH**

Jabatan : **Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA Kabupaten Sukamara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Plt. Kepala DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa**

M. ROMDONI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya kualitas Manajemen dan Tertib administrasi desa	Persentase desa yang mengikuti kegiatan BBGRM dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	14 %
2	meningkatnya kualitas dan kemampuan Aparatur desa dalam pengelolaan manajemen, administrasi dan keuangan desa	Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	20 %
3	desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	39 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan P3MD (camat, pemerintah desa, pld, pd, dan tenaga ahli P3MD) aktif	58 orang
		Jumlah PKK Aktif	38 PKK

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		
	- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangun desa	62.950.000	APBD
	- Kegiatan Pencanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	407.850.000	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		
	- Kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa	77.000.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Fasilitas Desa		
	- Kegiatan Pendampingan Penyusunan APBDes	46.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Keberdayaan		

	Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	950.000.000	APBD
	- Kegiatan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	19.000.000	APBD
	- Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna	45.425.000	APBD

Plt. Kepala DINSOSPMDPP-PA

Kabupaten Sukamara



HARAPAN WAHAL S.Sos. MH

Pembina Tk. I

Nip. 19681013 199012 1 001

Sukamara, Januari 2019
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten Sukamara



M. ROMDONI SE

Pembina IV. a

Nip. 19721025 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS YULIAWANTO, SE**
Jabatan : **Kasi Fasilitasi Pembangunan Desa**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. ROMDONI, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa


M. ROMDONI, SE

Pihak Pertama,
Kasi Fasilitasi Pembangunan Desa
Kabupaten Sukamara


AGUS YULIAWANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan laporan pertanggung jawaban APBDes tepat waktu	39 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan dan Fasilitas Desa		
	- Kegiatan Pendampingan Penyusunan APBDes	46.000.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sukamara

M. ROMDONI, SE
Pembina IV. a
Nip. 19721025 200312 1 005

Sukamara, Januari 2019
Kasi Fasilitas Pembangunan Desa
DINSOSPMDPP-PA
Kabupaten Sukamara

AGUS YULIAWANTO, SE
Penata III.c
Nip. 19790323 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDUNG, SE**

Jabatan : **Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. ROMDONI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa**


M. ROMDONI, SE

Pihak Pertama,
**Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kabupaten Sukamara**


ANDUNG, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatkan kualitas Manajemen dan Tertib administrasi desa	Persentase desa yang mengikuti kegiatan BBGRM dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	14 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan P3MD (camat, pemerintah desa, pld, pd, dan tenaga ahli P3MD) aktif	58 orang
		Jumlah PKK Aktif	38 PKK

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		
	- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangun desa	62.950.000	APBD
	- Kegiatan Pencanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	407.850.000	APBD
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
	- Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000	APBD
	- Kegiatan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	19.000.000	APBD
	- Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna	45.425.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sukamara

M. ROMDONI, SE

Sukamara, Januari 2019
Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kabupaten Sukamara

ANDUNG, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.52 Telp. (0532) 26691 e-mail : pmd_sukamara@yahoo.co.id Sukamara

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNI ARSASI, S.IP**

Jabatan : **Kasi Bina Pemerintahan Desa**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. ROMDONI, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

M. ROMDONI, SE

Pihak Pertama,
**Kasi Bina Pemerintahan Desa
DINSOSPMDPPPA
Kabupaten Sukamara**

YUNI ARSASI, S.IP



PERJANJIAN KINERJA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
TAHUN 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
2	meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparatur desa dalam pengelolaan manajemen , administrasi dan keuangan desa	Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	20 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan P3MD (camat, pemerintah desa, pld, pd, dan tenaga ahli P3MD) aktif	58 orang
		Jumlah PKK Aktif	38 PKK

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		
	- Kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa	77.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
	- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	950.000.000	APBD

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sukamara


M. ROMDONI SE

Pembina IV. a
Nip. 19721025 200312 1 005

Sukamara, Januari 2019
Kasi Bina Pemerintahan Desa
DINSOSPMDPP-PA
Kabupaten Sukamara


YUNIARSASI S.IP

Penata Tk. I
Nip. 19800411 200604 2 023